

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir risiko dan dampak buruk dari suatu bencana, baik korban jiwa, kerugian harta benda, maupun kerusakan lingkungan. Mitigasi bencana adalah salah satu aspek penting dalam manajemen kebencanaan. Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Definisi ini menekankan bahwa mitigasi tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek non-fisik seperti edukasi dan penyadaran kepada Masyarakat. Di tingkat daerah, amanat UU ini diturunkan melalui Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana, serta dipertegas smelalui Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2014.

Menurut Carter (1991), mitigasi bencana adalah tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Definisi ini menekankan pada pentingnya langkah-langkah preventif sebagai bagian dari perencanaan kebencanaan. Sementara itu, Diposaptono (1999), menyatakan bahwa mitigasi bencana dapat dilakukan dengan cara menghindari pembangunan di daerah rawan bencana, perencanaan tata ruang, serta penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa mitigasi bencana pada dasarnya merupakan upaya yang bersifat mencegah. Mitigasi tidak hanya berfokus pada

pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana ini penting karena dapat mengurangi jumlah korban jiwa, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dari dampak bencana yang mungkin terjadi.

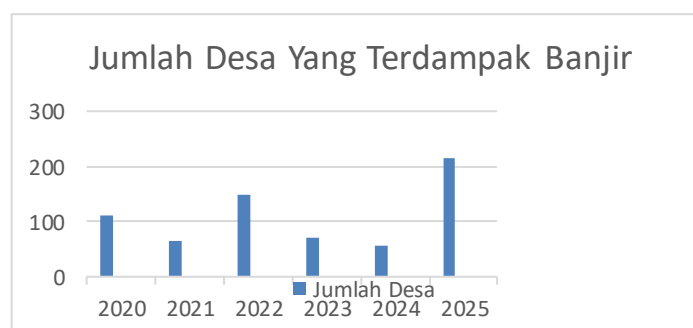
Fenomena banjir di kabupaten Aceh Tamiang merupakan contoh nyata yang menunjukkan urgensi dari pelaksanaan mitigasi bencana. Hampir setiap tahun wilayah ini mengalami banjir, terutama pada musim hujan ketika curah hujan meningkat dan debit air Sungai Tamiang meluap. Sungai Tamiang yang melintasi beberapa kecamatan memiliki aliran yang cukup deras, sehingga ketika curah hujan tinggi dan kondisi hulu tidak mampu menampung volume air, maka daerah dataran rendah di sekitarnya akan terdampak banjir (Waspada.id, 2023). Kondisi ini menyebabkan banjir menjadi salah satu bencana yang paling sering melanda masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

Banjir di Aceh Tamiang bukan hanya sekadar fenomena alam, tetapi juga membawa dampak yang sangat serius terhadap kehidupan masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan meliputi kerusakan rumah, lahan pertanian yang terendam, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Selain itu, banjir juga menimbulkan dampak sosial berupa terganggunya aktivitas pendidikan, kesehatan, serta menurunnya kualitas hidup Masyarakat (Nurjolis, 2025). Bahkan beberapa kejadian, banjir di Aceh Tamiang menyebabkan korban jiwa (Masriadi & Susanti, 2025). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa ketidakadaan atau lemahnya upaya mitigasi akan membuat dampak banjir terus berulang dari tahun ke tahun. Sebaliknya, dengan mitigasi yang tepat, seperti perencanaan tata ruang yang lebih baik, pembangunan

infrastruktur pengendali banjir, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, risiko yang ditimbulkan dapat ditekan atau dapat berkurang. Dalam konteks inilah, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang menjadi sangat strategis.

Sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani penanggulangan bencana, BPBD memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan mitigasi bencana banjir. Mitigasi tidak bersifat struktural, seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, atau infrastruktur pengendali banjir, melainkan non-struktural, seperti penyuluhan kepada masyarakat, penyusunan peta rawan bencana dan pembentukan desa tangguh bencana. Dengan demikian, keberadaan BPBD diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi dampak bencana banjir yang berulang. Sejalan dengan peran BPBD Menurut Dewi (2023), BPBD merupakan lembaga yang berperan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di tingkat daerah, penyajian data jumlah desa yang terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang periode 2020–2025 menjadi relevan sebagai landasan untuk menganalisis dinamika kejadian banjir serta tingkat dampak yang ditimbulkan.

Gambar 1. 1 Data Banjir Kabupaten Aceh Tamiang 2020 – 2025



Sumber: BPBD Aceh Tamiang, 2025

Berdasarkan data diatas, jumlah desa terdampak banjir di Kabupaten Aceh

Tamiang menunjukkan angka yang cukup signifikan terutama pada tahun 2025. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 110 desa yang terdampak banjir. Kondisi menurun pada tahun 2021 menjadi 65 desa. Tahun 2022 jumlah desa yang terdampak banjir meningkat menjadi 150 desa, dan terjadi penurunan pada Tahun 2023 sejumlah 70 desa yang terdampak banjir, di tahun 2024 jumlah desa yang terdampak banjir semakin menurun menjadi 55 desa. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2025. Sebanyak 206 desa yang ada di kabupaten Aceh Tamiang terendam banjir. Tingginya jumlah desa yang terkena dampak menjadi bukti bahwa banjir merupakan ancaman serius bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 1.1 Data Korban Bencana Banjir Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2025

No.	Kecamatan	Total Terdampak (Jiwa)	Total Terdampak (KK)
1.	Karang Baru	47.036	11.699
2.	Kuala Simpang	19.225	4.806
3.	Bendahara	34.066	8.504
4.	Banda Mulia	13.747	3.435
5.	Kejuruan Muda	36.286	10.208
6.	Sekerak	8.116	2.030
7.	Rantau	40.240	10.061
8.	Tamiang Hulu	17.125	4.276
9.	Bandar Pusaka	15.346	4.229
10.	Manyak Payed	36.445	9.137
11.	Tenggulun	19.268	4.819
12.	Seruway	9.535	1.907

Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tamiang

Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang menjelang akhir November 2025 menyebabkan kerusakan yang sangat luas dan berdampak serius terhadap

berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kabupaten yang dikenal dengan julukan Bumi Muda Sedia tersebut mengalami kehancuran akibat terjangan air bercampur lumpur serta material kayu gelondongan yang hanyut dari hulu sungai. Arus banjir menerobos kawasan permukiman warga, merusak lahan pertanian dan perkebunan rakyat, menghancurkan gedung sekolah, fasilitas pemerintahan, serta memutus akses jalan dan jembatan. Kondisi ini mengakibatkan lumpuhnya aktivitas perekonomian, terganggunya roda pemerintahan, dan rusaknya tatanan kehidupan sosial Masyarakat.

Aceh Tamiang tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat dampak terparah dalam peristiwa banjir bandang tersebut. Tinggi genangan air di sejumlah wilayah mencapai sekitar 4 hingga 5 meter, sehingga banyak rumah warga terendam dan tidak dapat lagi dihuni sementara waktu atau bahkan sudah tidak dapat dihuni lagi karena rusak parah. Akibatnya, ribuan penduduk terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti posko pengungsian, gedung sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

Gambar 1.2 Banjir di Kabupaten Aceh Tamiang Pada November 2025



Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/30/13205331/aceh-tamiang-usai-banjir-4839-rumah-hilang-beberapa-desa-betul-betul-raib>

Banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025 menyebabkan dampak kerusakan yang sangat serius. Bupati Aceh Tamiang,

Armia Fahmi menyatakan bahwa sebanyak 4.839 rumah warga hilang tersapu banjir, terutama di wilayah permukiman yang berada di bantaran sungai (Kompas.com, 2025).

Fenomena banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir tahun 2025 memperlihatkan adanya kesenjangan yang nyata antara perencanaan mitigasi bencana dengan realitas di lapangan. Meskipun pemerintah daerah melalui BPBD telah melakukan berbagai upaya mitigasi, seperti normalisasi sungai, perbaikan tanggul, pembangunan sistem drainase serta pembentukan desa tangguh bencana, fakta menunjukkan bahwa banjir tetap meluas dan berdampak pada ratusan desa dengan jumlah korban yang berdampak besar. Berdasarkan fenomena yang terjadi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mitigasi banjir di Aceh Tamiang masih didominasi oleh pendekatan struktural dan penanganan darurat, sementara aspek non-struktural, khususnya penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah warga yang harus mengungsi, terbatasnya kesiapan menghadapi banjir, serta rendahnya kemampuan adaptasi masyarakat terhadap ancaman banjir yang berulang. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menelaah peran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung mitigasi bencana banjir yang dijalankan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas permasalahan banjir dari berbagai perspektif, baik penyebab, dampak, maupun strategi penanggulangannya. Misalnya pelaksanaan prosedur pemerintah dalam implementasi strategi penanggulangan bencana banjir (Fadila Rahcmawati & Ilmi Usrotin Choiriyah, 2024). Tanggung jawab pelayanan BPBD terhadap bencana banjir (Hena Salsabila

et al., 2024). Formulasi, Implementasi dan Evaluasi strategi BPBD dalam penanggulangan banjir (Bayu Mahardika et al., 2022). Pertanggungjawaban hukum, hambatan dan upaya pemerintah dalam penanggulangi bencana banjir (Dandi Davical Latuperissa et al., 2025). Perbaikan tanggul jebol di Kabupaten Aceh Tamiang (Erika Revida et al., 2024).

Kemudian beberapa penelitian lainnya juga membahas mengenai responsivitas pemerintah dan hambatan yang dialami pemerintah. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung terbatas dalam membahas mitigasi secara komprehensif di tingkat lokal, termasuk di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi seperti Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian pula, aspek keterlibatan masyarakat yang meliputi kesiapsiagaan, partisipasi, dan kemampuan adaptasi terhadap banjir belum banyak ditelaah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, yakni masih minimnya kajian mengenai strategi mitigasi penanggulangan bencana dan responsivitas masyarakat sebagai aktor utama di lapangan. Padahal, keberhasilan mitigasi bencana banjir tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis, tetapi juga pada tingkat keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam mendukung implementasi strategi tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara lebih komprehensif kebijakan mitigasi bencana banjir yang dijalankan di Kabupaten Aceh Tamiang serta partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai mitigasi bencana sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk upaya pengurangan risiko banjir yang lebih efektif

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3 Fokus Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tamiang yang meliputi perbaikan dan pemeliharaan tanggul, reboisasi daerah aliran sungai (DAS), pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi dan sosialisasi serta edukasi. Meskipun secara teoritis mitigasi bencana mencakup cakupan yang sangat luas, penelitian ini membatasi ruang lingkup pada empat kebijakan tersebut karena merupakan kebijakan nyata yang benar-benar direalisasikan di lapangan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana banjir. meliputi keterlibatan, kesiapsiagaan, dan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi banjir.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman luas mengenai mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Secara Spesifik, penelitian

ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya kebijakan mitigasi bencana banjir yang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Menganalisis keterlibatan masyarakat, meliputi kesiapsiagaan, partisipasi dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa aspek, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu mitigasi bencana, khususnya terkait integrasi antara strategi kelembagaan pemerintah dan keterlibatan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BPBD Aceh Tamiang dalam memperkuat strategi mitigasi bencana melalui koordinasi dan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini memberi pemahaman tentang pentingnya kesiapsiagaan dan kerja sama dalam menghadapi banjir agar dampaknya dapat diminimalkan.